

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Daftar Pertanyaan Wawancara Bersama Bagian Umum dan Kepegawaian
1	Bagaimana penerapan prinsip transparansi dilakukan secara langsung di satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah ?
2	Bagaimana proses pembentukan tim satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menangani COVID-19?
3	Apakah ada struktur organisasi satgas didinas kesehatan ?
4	Bagaimana penanganan komunikasi saat terjadi bencana di satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menangani wabah COVID-19?
5	Apakah benar pembuatan situs Corona.Jatengprov.go.id merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem informasi dan dokumentasi ?
6	Sarana dan prasarana layanan informasi publik apa yang dipakai oleh satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menyebarkan informasi tentang wabah COVID-19?
7	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan dan memberikan informasi secara langsung?
8	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah memiliki media center?
9	Apakah benar Situs https://corona.jatengprov.go.id/ dibuat sebagai rujukan informasi utama tentang penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah?
10	Kapan dibuatnya situs https://corona.jatengprov.go.id/ ?
11	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah Provinsi Jawa Tengah?
12	Apakah benar yang dimaksud dengan jenis penyakit adalah varian COVID-19? Kalau benar mengapa tidak ada jenis varian COVID-19 di situs corona.jatengprov.go.id?
13	Mengapa tidak ditemukan data harian persebaran COVID-19 di setiap daerah ?
14	Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang ODP dan PDP?
15	Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang persebaran COVID-19 di wilayah desa/kelurahan ?
16	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19?

17	Mengapa fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator tidak ditemukan dalam situs corona.jatengprov.go.id ?
18	Mengapa informasi kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19 tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
19	Mengapa informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan APD tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
20	Mengapa informasi akses layanan rapid test tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
21	Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang lokasi khusus pemakaman bagi pasien COVID-19?
22	Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19 ?
23	Apa saja bentuk rencana kebijakan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah Jawa Tengah lewat situs corona.jatengprov.go.id ?
24	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah mengupayakan adanya sistem data/informasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara real time?
25	Bagaimana prosedur pengumpulan data/informasi COVID-19 ?
26	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan status waktu data/informasi kepada publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/ informasi?
27	Bagaimana satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan COVID-19 sudah diterima masyarakat?
28	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi atau sistem elektronik ?
29	Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan bagaimana masyarakat mendapat hak atas program-program pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya?
30	Apakah yang dimaksud oleh informasi akses layanan keuangan dan perbankan dalam isi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020?
31	Bagaimana satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah Menginformasikan akses dan perubahan mekanisme layanan publik terkait dengan hajat hidup orang banyak?

Lampiran 2. Hasil wawancara peneliti dengan staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang bernama Bapak Andreas Dian Sukarno Putro S.kom. Peneliti Mengajukan 31 pertanyaan seperti yang terlampir dibawah ini:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dilakukan secara langsung di satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah ?
Bentuk transparansinya ya melalui Situs coronajatengprov.go.id datanya kan kita buka. Bentuk transparansinya semua data-data yang di upload. Iya dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga.
2. Bagaimana proses pembentukan tim satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menangani COVID-19?
Proses pembentukannya langsung ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan bidangnya. Kalau di bidang sosial ya sosial kalau di bidang kesehatan yang tentang kesehatan.
3. Apakah ada struktur organisasi satgas di dinas kesehatan ?
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor: 44/3290/1.1/2020
4. Bagaimana penanganan Komunikasi saat terjadi bencana di satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menangani wabah COVID-19?
Saat wabah COVID-19 terjadi kemarin. Pertama segala data dan informasi itu ada dinas kesehatan provinsi jawa tengah tetapi sumber datanya ada di kabupaten kota yang dikirim ke dinas kesehatan provinsi jawa tengah setelah itu kita analisa lalu kita buat decisionnya. Saat awal-awal kita kita merangkul media untuk dibuatnya *press conference*. *Press conference* tersbut diadakan seminggu sekali .kita melaporkan ke Gubernur lalu Gubernur melakukan *press conference*. Lalu setelah itu muncullah satgas. Setelah muncul satgas di beberapa kesempatan kepala dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah mendapatkan mandat untuk melaporkan. Lalu kita juga mempunyai medsos untuk penyampain komunikasi. Medsos yang dipakai adalah instagram, twitter dan facebook. Lalu kita awal-awal juga ada *call center* 24 jam. Terus lama-lama ada website lalu kita ngepull semua data disana
5. Apakah benar pembuatan situs Corona.Jatengprov.go.id merupakan langkah pemerintah dalam membangun sistem informasi dan dokumentasi ?
Iya memang betul
6. Sarana dan prasarana layanan informasi publik apa yang dipakai oleh satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah dalam menyebarkan informasi tentang wabah COVID-19?
Intagram, twiter, facebook, *call center* dan situs. Dan itu media sosial itu bersifat dua arah.
7. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan dan memberikan informasi secara langsung?
Iya dilakukan secara langsung tanpa ada pihak ketiga.
8. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah memiliki media center?
Iya ada *call center*

9. Apakah benar Situs <https://corona.jatengprov.go.id/> dibuat sebagai rujukan informasi utama tentang penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah? Iya pasti mas karna diluar kan banyak hoak kita counternya lewat coronajatengprov.go.id dan medsos. Di *call center* juga banyak pertanyaan hoak seperti itu kita klarifikasi semua lewat situ. Karna tidak semua familiar dengan telpon dan tidak semua mau membaca karna literasinya kurang. Biasa tanya dulu . sebenarnya sudah ada informasi di medsos dan situs dari kami tetapi biasanya minat baca kurang pegenya tanya langsung. Jadi buka *call center* untuk menangani.
10. Kapan dibuatnya situs <https://corona.jatengprov.go.id/> ?
Sekitar bulan april 2020
11. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerah Provinsi Jawa Tengah?
Ya ini produknya seperti video, seperti peta persebaran, regulasi
12. Apakah benar yang dimaksud dengan jenis penyakit adalah varian COVID-19? Kalau benar mengapa tidak ada jenis varian COVID-19 di situs corona.jatengprov.go.id?
Kalo jenis penyakit, COVID-19 itu satu penyakit. Kalo varian itu hanya variannya saja penyakitnya tetap COVID-19
13. Mengapa tidak ditemukan data harian persebaran COVID-19 di setiap daerah ?
Kalo peta persebaran dulu ada sampai perkapupaten kota tetapi sekarang ditarik karena ada masalah di bridging system dengan sistemnya kemenkes. Kita kasih globalnya dulu.
14. Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang ODP dan PDP?
Sekarang sudah diubah menjadi proable dan suspek. Suspek itu untuk ODP dan proable untuk PDP. Tetapi untuk pasien proable dan suspesebelumnya ada sekarang dihilangkan untuk penyederhanaan
15. Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang persebaran COVID-19 di wilayah desa/kelurahan ?
Kalau dulu sampai kabupaten kota kalau desa/ kelurahan di masing-masing kabupaten kotanya.
16. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19?
Kalo ini biasanya di media sosial lebih banyaknya. Kalau di situs ada tetapi tidak banyak. Kalau di situsnya contohnya seperti vaksinasi. Terakhir vaksin mobile. Kalau di situs salau satunya di berita.
17. Mengapa fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator tidak ditemukan dalam situs corona.jatengprov.go.id ?
Ini gak ada karena kemenkes punya situs sendiri untuk itu. Beberapa disampaikan lewat website rumah sakit yang linknya berada di situs coronajatengprov.go.id. karena di setiap rumah sakit mempunyai aplikasi sendiri terkait hal tersebut.nah itu akan lebih sulit untuk dijadikan satu di

- situs coronajatengprov.go.id karena sistem di setiap rumah sakit berbeda. maka dari itu kita kasih ke link rumah sakit yang bersangkutan.
18. Mengapa informasi kapasitas rumah sakit untuk pasien COVID-19 tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
Ini gak ada karena kemenkes punya situs sendiri untuk itu. Beberapa disampaikan lewat situs rumah sakit yang linknya berada di situs coronajatengprov.go.id.
 19. Mengapa informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan APD tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
Itu adanya di masing-masing ppid di laporan keuangan adanya hanya belanja distribusi dan ketersediaan APD
 20. Mengapa informasi akses layanan rapid test tidak ditemukan di situs corona.jatengprov.go.id ?
Adanya rujukan laboratorium di Jawa Tengah yang bisa rapid test. Ada juga dalam bentuk infografis
 21. Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang lokasi khusus pemakaman bagi pasien COVID-19?
Kalo lokasi khusus tidak di dinkes kalo penanganan jenazah iya. karena masalahnya keadaan jenazah membawa virus jadi memang harus kita atur. Kalo lokasinya ini lebih di kabupaten kota mereka itu sendiri-sendiri. Rananya satgas Jawa Tengah hanya informasi penanganan jenazah. Karena kita tidak bisa mengatur kota karena mereka punya kepala daerahnya masing-masing lokasinya yang dituju tergantung kebijakan masing-masing.
 22. Mengapa dalam situs corona.jatengprov.go.id tidak ditemukan informasi tentang Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19 ?
Informasi tentang akses, biaya dan jaminan kesehatan gak ada tapi dari pusat ada edarannya
 23. Apa saja bentuk rencana kebijakan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah Jawa Tengah lewat situs corona.jatengprov.go.id ?
Salah satunya tentang penunjukkan laboratorium rujukan. terus yang kedua dulu itu kan rumah sakit rujukan ada tingkat level 1, 2 dan 3 level dari kementerian itu Cuma sampai 2 untuk rumah sakit rujukan kita di provinsi itu menunjuk untuk level 3 untuk kabupaten kota. Ada juga penutupan jalan. Bentuk informasinya bisa dalam bentuk infografis dan surat keputusan
 24. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah mengupayakan adanya sistem data/informasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara real time?
Iya yang seperti di situs kita cut offnya jam 4 kalo dulu 2 kali dalam sehari jadi benar-benar real time. Terus untuk informasi ada juga *call center* dan medsos.
 25. Bagaimana prosedur pengumpulan data/informasi COVID-19 ?

Dari kabupaten kota tracing dulu lalu dapat datanya dikumpulkan di provinsi lalu provinsi menganalisa terus setelah itu dilaporkan ke Gubernur sebagai ketua Satgas setelah itu Gubernur menyampaikan kepada publik. Data-data tersebut dicantumkan di situs coronajatengprov.go.id

26. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan status waktu data/informasi kepada publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/ informasi?

Sudah jadi di coronajatengprov.go.id ada menu data. Itu ada data kasusnya di sebelah kiri atas data itu di cut off tanggal berapa dan jam berapa. jadi kelihatan memang ini data diambil seumpama jam 4 sore hari ini data tersebut kumpulan dari data jam 4 sore sampai data yang sebelumnya.

27. Bagaimana satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan COVID-19 sudah diterima masyarakat?

Kita ada beberapa jalur media nah itu salah satunya. Biasa kita upload di medsos orang paling banyak menghabiskan waktunya di medsos jadi strateginya di medsos kalau situs orang jarang baca. Kalau di medsos kadang keluar di timeline jadi strateginya untuk ini disitu. Kalau situs memeriksanya di data kunjungan. Tetapi data kunjungan berada di kominfo.

28. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi atau sistem elektronik ?

Sudah salah satunya melalui *call center*.

29. Apakah satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah sudah menginformasikan bagaimana masyarakat mendapat hak atas program-program pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya?

Kalo usaha mikro di dinas koperasi dan umkm kalau yang sosial adanya di dinas sosial. Kalau di situs paling melalui di infografis dan berita. Kalo di situs lebih fokus ke penanganan penyakit kalo untuk bantuan tidak diinformasikan melalui coronajatengprov.go.id

30. Apakah yang dimaksud oleh informasi akses layanan keuangan dan perbankan dalam isi SE KIP Nomor 2 Tahun 2020?

Tidak dilaporkan di coronajatengprov.go.id

31. Bagaimana satuan Gugus Tugas Provinsi Jawa Tengah Menginformasikan akses dan perubahan mekanisme layanan publik terkait dengan hajat hidup orang banyak?

jadi disini ada beberapa layanan kita online kan salah satunya STR (surat tanda registrasi). Str itu seperti *license* contoh farmasi atau perawat itu butuh *license* untuk praktek *license* itu harus diperbaharui. Layanan yang kita mekanismenya yang ini jadi bisa online mengirim ke kantor dan bisa datang ke kantor. Kalo di situs adanya deteksi dini dan infografis. Salah satunya aplikasi peduli lindungi, starterpack dan laporgub. Layanan lapor gub dulunya sebelum corona sudah ada tapi sekarang digerakan lagi untuk penanganan COVID-19.

Lampiran 3. Upaya-Upaya Mitigasi Penyebaran dan Penanganan COVID-19

NO	Upaya Mitigasi Penyebaran dan Penanganan COVID-19	Jenis
1	Surat Edaran Nomor 965/1332 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Tatanan Normal Baru	Regulasi
2	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0107/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi	Regulasi
3	Tausiyah Nomor 04/DP-P.XIII/T/V/2020 Tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 Dalam Situasi Darurat COVID-19	Regulasi
4	Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Regulasi
5	Surat Edaran Nomor:SE 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19	Regulasi
6	Intruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”	Regulasi
7	Ganjar Pranowo Imbau Masyarakat di Jateng Gencarkan Patroli dan Ronda Malam selama Pandemi Corona	Berita
8	Berkunjung ke Pasar Pagi di Salatiga, Ditata Berjarak, Pembeli Tak Takut Lagi Berbelanja	Berita
9	Pemkab Banyumas Resmi Tegakkan Aturan Tak Pakai Masker Denda Maksimal Rp 50 Ribu	Berita
10	Patuhi Perintah Kemenag, Ganjar Imbau Masyarakat Salat Id di Rumah	Berita

11	Ganjar Kontrol Persiapan Penerapan Normal Baru	Berita
12	Cek Kesiapan New Normal di Jateng, Ganjar Datangi Kantor Samsat dan Pelayanan Terpadu	Berita
13	Wagub Taj Yasin: Santri Masuk Pondok Di Jateng Wajib Karantina	Berita
14	Jawa Tengah Kebut Tes Massal, Kasus Positif COVID-19 Capai 3.000 Orang	Berita
15	Ganjar Bentuk 6 Satkorwil, untuk Percepatan Penanganan COVID di Jateng	Berita
16	Jateng Siapkan Operasi Penegakan Serentak Protokol Kesehatan	Berita
17	Tekan Angka Kematian, Ganjar Minta Penderita Gula Darah dan Hipertensi Tetap di Rumah	Berita
18	Muncul Klaster Ponpes di Kebumen dan Banyumas, Ganjar Minta Pembelajaran Dihentikan	Berita
19	Belanja dari rumah	Infografis
20	Satgas kesehatan joko tonggo , satgas hiburan joko tonggo, satgas ekonomi joko tonggo, satgas sosial dan keamanan joko tonggo	Infografis
21	Giati gerakan gotong royong untuk joko tonggo	Infografis
22	Ayo tertib lapor	Infografis
23	Panduan petugas zakat, infaq, dan shadaqah selama pandemi COVID-19	Infografis
24	Silaturahmi ala <i>physical distancing</i>	Infografis
25	Corona Dilawan dengan Mencuci tangan	Infografis
26	Tips ngantor lagi di tengah masa pandemi tatanan normal baru, kebiasaan baru	Infografis
27	Beribadah di Rumah Ibadah	Infografis
28	<i>New normal Starter Pack</i>	Infografis
29	Tetep resepsi meskipun di masa pandemi	Infografis
30	Tips memilih tempat makan aman	Infografis
31	Waspada OTG	Infografis
32	Kota Semarang memberlakukan pkm jilid 4	Infografis
33	Persiapan wisata di era new normal	Infografis
34	Ketentuan jual beli hewan kurban	Infografis
35	Tips nge-mall sehat	Infografis
36	<i>Face Shield</i> pengaman tambahan	Infografis
37	Tetap pakai masker walau dalam ruangan	Infografis
38	Waspada klaster perkantoran	Infografis
39	Kenapa tidak boleh ngobrol di transportasi umum	Infografis
40	Jangan turunkan maskermu apalagi tempel di dagu	Infografis

41	Gowes pakai masker	Infografis
42	Waspada <i>happy hyoxia</i>	Infografis
43	Waspada dan hindari 3 kondisi tempat ini	Infografis




Lampiran 4. Kebijakan Penanganan COVID-19

NO	Upaya Mitigasi Penyebaran dan Penanganan COVID-19	Jenis
1	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/05196 Tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021	Regulasi
2	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421/06356 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021	Regulasi
3	Surat Edaran Nomor 965/1332 Tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Dalam Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Masa Tatanan Normal Baru	Regulasi
4	Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Regulasi
5	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.0107/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi	Regulasi
6	Intruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "Satgas Jogo Tonggo"	Regulasi
7	Surat Edaran Nomor 440/0007223 Tentang Kewajiban Penggunaan Masker Bagi Masyarakat Dan Prosedur Karantina Rumah Bagi Masyarakat Di Jawa Tengah	Regulasi

8	Surat Edaran Nomor:Se 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan Dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah COVID-19	Regulasi
9	Surat Edaran Nomor: 443.5/0007222 Tentang Tata Cara Pengurusan Jenazah Terinfeksi COVID-19	Regulasi
10	Ganjar Minta Puskesmas Tetap Layani Imunisasi saat Pandemi COVID-19	Berita
11	fasilitas keringanan kredit	Infografis
12	Kota Semarang memberlakukan pkm jilid 4	Infografis
13	Tetep resepsi meskipun di masa pandemi	Infografis
14	Ketentuan jual beli hewan kurban	Infografis
15	Waspada klaster keluarga	Infografis
16	Mengapa butuh vaksin COVID-19	Infografis
17	Virus mati kalau kamu lakukan ini	Infografis
18	Aku demam dan perlu tes nggak yaa	Infografis
19	Mulai tegur orang yang salah memakai masker	Infografis
20	Yuk! Buang sampah masker sekali pakai dengan bijak	Infografis

Lampiran 5. Surat persetujuan wawancara dengan Dinas kesehatan

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**
DINAS KESEHATAN
Jl. Piere Tendean No. 24 Semarang Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463
Website : dinkesjatengprov.go.id E-mail : dinkes@jatengprov.go.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 026 Semarang

Semarang, 19 Juli 2022

Nomor : 423.4/3261
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas
Hukum dan Komunikasi
Universitas Soegijapranata
di- Semarang

Sehubungan dengan surat Kepala Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata Nomor 00361/B.7.3/PSIK/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian atas :

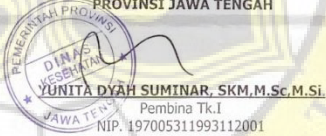
Nama : Revel Christian Waroh Santoso.
NIM. : 17.M1.0059
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata
Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Nomor
2 Tahun 2020 Terhadap Layanan Informasi Bencana
Covid 19

Bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :


1. Pengambilan Data pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersifat hanya untuk mendukung pendidikan ;
2. Data yang di butuhkan dalam penelitian lebih difokuskan kepada judul tugas akhir penelitian yang diajukan
3. Membayar Biaya Retribusi sesuai Pergub Jawa Tengah no. 25 Tahun 2019 tentang perubahan Tarif Retribusi Daerah
4. Informasi lain tentang Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada website kami : <http://www.dinkesjatengprov.go.id>

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**


YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 197005311993112001

Tembusan :
Kepala Sub.Bagian Keuangan Dinkes Provinsi Jawa Tengah ;



Lampiran 6. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020

Komisi Informasi Pusat memberikan panduan untuk pemerintah pusat dan daerah untuk menginformasikan hal berikut ke publik;

- 1) Jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit (episentrum/klaster), dan pencegahannya
- 2) Secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran COVID-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Pasien positif COVID-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak berwenang. Adapun data pribadi yang dimaksud terdiri atas: nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data Pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19, namun demikian tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh yang bersangkutan atau keluarga inti dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
- 3) Menginformasikan penyebaran COVID-19 sebagai sarana peringatan dini (*early wArning*) bagi masyarakat, yang meliputi: (i) area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan dan/atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19, dan (ii) upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat.
- 4) Informasi layanan kesehatan, yang meliputi antara lain: (i) rumah sakit rujukan dan /atau fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator dan

tenaga medis yang menangani COVID-19 (ii) informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien COVID-19 (iii) informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang menangani COVID-19, (iv) informasi akses layanan *rapid test*, (v) nomor hotline layanan kesehatan yang menangani COVID-19 (vi) mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala COVID-19 dan (vii) mekanisme/protokol pengaduan masyarakat COVID-19.

- 5) Informasi penanganan jenazah dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien COVID-19
- 6) Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19
- 7) Rencana kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan perubahannya.

Komisi Informasi Pusat memberikan panduan untuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penanganan komunikasi darurat COVID-19 dengan memperhatikan hal berikut:

- 6) Mengupayakan adanya sistem data/informasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara *real time*.
- 7) Memiliki prosedur pengumpulan data/informasi yang sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan kepada publik.
- 8) Menyampaikan status waktu bagi data/informasi yang disampaikan kepada publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/ informasi.

9) Memastikan agar data/informasi terkait dengan sebaran dan penanganan COVID-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial terdampak.

10) Memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveillance) yang disusun oleh pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat.

Komisi Informasi Pusat memberikan panduan untuk pemerintah pusat dan daerah yang berwenang mengurus ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama masa darurat kesehatan akibat COVID-19 dengan menyampaikan informasi tentang ketersediaan, distribusi dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya;

- 1) Informasi cara mendapatkan hak atas program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya;
- 2) Informasi akses layanan keuangan dan perbankan; dan
- 3) Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

PAPER NAME

17.M1.0059_REVEL CHRISTIAN WS.docx

WORD COUNT

12978 Words

CHARACTER COUNT

86192 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

122.4KB

SUBMISSION DATE

Aug 30, 2022 10:32 AM GMT+7

REPORT DATE

Aug 30, 2022 10:34 AM GMT+7

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- Crossref database
- 10% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)